



**NTB
TRANSPARAN**



LAPORAN PPID TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi NTB Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi NTB juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2024 Kategori Pemerintah Provinsi Informatif Peringkat Satu Nasional berdasarkan keputusan Komisi Informasi pusat RI Nomor : 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik tahun 2024 dengan Nilai 98,52.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB pada masa selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Desember 2024

KETUA PPID PROVINSI NTB,



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750112 199603 1006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bagian I Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	1
Bagian II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	5
Bagian III Layanan Informasi Publik.....	10
Bagian IV Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi.....	11
Bagian V Kendala Eksternal dan Internal	15
Bagian VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Regulasi	1
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB	5
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB	7
Tabel 2.3 Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia	8
Tabel 2.4 Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2023	9
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi	11
Tabel 4.1 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	11
Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi	17
Tabel 7.2 Besaran Anggaran PPID Utama NTB	18

Bagian I

GAMBARAN UMUM

DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengelolaan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.1. Regulasi

1.1. Tabel Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015

2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB	2018
4.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550 – 277 Tahun 2017	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021	2017
5.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-714 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021	2018
6.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor: 188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2013
7.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 550-277 Tahun 2017	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	2017
8.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Nomor 157 Tahun 2018	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018	2018

9.	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-254 Tahun 2019	Tentang perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Nomor 550-559 tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi provinsi Nusa Tenggara barat Masa Bhakti 2016-2020	2019
10	Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik	2020
11.	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550 -451 Tahun 2020	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020
12	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550 -46 Tahun 2021	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021
13	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-356 Tahun 2022	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2022
14	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 550-175 Tahun 2023	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2023
15	Keputusan Gubernur NTB Nomor : 049-364 Tahun 2024	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2024

16	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor: 500.12.11-792 Tahun 2024	Tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Data Dikeualikan atau Dirahasiakan Pada Pelaksanaan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.	2024
17	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor: 57 Tahun 2024	Tentang Penetapan Informasi Dikecualikan Pada Pengelolaan PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	2024
18	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB Nomor : 19b. Tahun 2024	Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	2024

1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi NTB pada tahun 2024 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melaksanakan SOP tentang Konsekuensi PPID
5. Melakukan update informasi publik;
6. Pembinaan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, pelatihan SDM PPID bagi operator SIP PPID Lembaga Pendidikan tingkat SMA/SMK se-NTB, serta penguatan komitmen lembaga untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP).

PPID Pemerintah Provinsi NTB selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi seperti Portal NTB Satu Data, Podcast Bintang, Digitalisasi, commendcenter.ntbprov.go.id, siaga.ntbprov.go.id, Media Sosial seperti @ntbprov, @humasntbprov, @ntb_prov, @pemprovntb3419.

Integrasi Website dan Media Sosial OPD serta RAPI (Repository Agency Publik Information) menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2024.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Jalan Udayana No. 14 Kota Mataram, satu kompleks perkantoran dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

Terdapat dua orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.ppid.ntbprov.go.id.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB

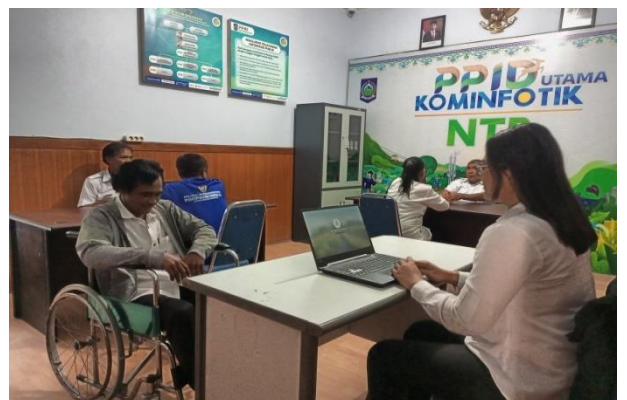
No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (3 buah) : Meja Layanan Tuna Rungu, Meja Layanan Ibu Hamil dan distabilitas - Laptop (3 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Lemari Arsip (2 buah)
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- Laptop (3 buah) - AC (1 buah) - Meja Kerja (3 buah)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - TV Tata Cara Pelaporan Layanan Informasi



Insert : Foto Sekretariat PPID Provinsi NTB



Insert : Foto Sekretariat PPID Provinsi NTB



2.2. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 550 – 254 Tahun 2019 Perubahan Perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara barat Masa Bahkti 2016-2024. Adapun komposisi dari personil PPID Provinsi NTB antara lain :

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID Utama	- Pembina, Atasan PPID Utama, Ketua PPID Utama dan Wakil Ketua PPID Utama (4 Orang) - Koordinator Bidang dan Anggota (7 Orang) - Staf Sekretariat PPID (3 Orang)	- - - Pengolah Desain Grafis

2.3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi NTB

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://ppid.ntbprov.go.id>)

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia.

No.	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	Jumlah Informasi Publik
1	Inspektorat	10	43	2	-	63
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17	-	-	-	17
4	BAPPEDA	17	1	-	1	19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	1	17	-	30
6	DPM-PTSP	6	2	4	2	14
7	BakesbangPoldagri	-	-	-	-	-
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-
9	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	10	-	-	-	10
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	-	6	-	14
12	Dinas Kominfo dan Statistik	8	-	3	-	11
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5	2	8	-	15
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	-	-	-	1
15	Dinas Perhubungan	22	-	9	-	31
16	Dinas Kelautan & Perikanan	180	2	15	1	198
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22	-	9	-	31
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44	-	9	-	53
19	Dinas Perindustrian	9	-	6	-	15
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8	-	2	-	10
21	Dinas Kesehatan	12	-	-	-	12
22	Dinas Sosial	27	-	4	-	31
23	Dinas Perdagangan	42	-	4	-	46
24	Dinas Pariwisata	46	1	-	-	47
25	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8	-	2	-	10
27	Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	-	-	-	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41	1	4	-	46

29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	-	18	-	30
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16	4	-	-	20
31	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	37	13	-	-	50
32	Biro Umum	10	-	1	-	11
33	Biro Organisasi	-	-	-	-	-
34	Biro Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP	46	-	26		72
35	Biro Hukum	-	-	-	-	-
36	Biro Pemerintahan	17	-	-	-	17
37	Biro Perekonomian	4	-	-	-	4
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22	-	1	-	23
39	Biro Kesra	19	-	-	-	19
40	Biro Administrasi Pimpinan	10	-	2	-	12
41	SATPOL-PP	71	-	8	1	80
42	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB	51	-	-	1	52
43	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	8	-	5	-	13
44	Badan Penghubung	-	-	-	-	-
45	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadi	-	-	-	-	-
46	Biro Administrasi Kerjasama	15	-	1	-	16
47	Badan Riset & Inovasi Daerah	-	-	-	-	-
Total		893	69	220	6	1143

2.4. Besaran Anggaran

Besaran anggaran untuk Pelayanan Informasi Publik pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pada Dinas Kominfotik terjadi realokasi dari total jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 bersumber dari dana APBD murni dan APBDP Provinsi NTB, sebesar 39.083.300,00 murni, Perubahan, sebesar 56.961.300,00

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2024

No.	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)
1.	APBD	39.083.300
2.	APBDP	56.961.300

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Kunjungan (Kali)	Jumlah Download DIP (Kali)
1	Januari	792	
2	Februari	1036	
3	Maret	1376	
4	April	914	
5	Mei	679	
6	Juni	1303	
7	Juli	646	
8	Agustus	0	
9	September	2	
10	Oktober	454	
11	November	527	
12	Desember	700	
Total		8429	

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi 2024

[illegible]

Bagian IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2024 terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

DATA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
1.	001/KINTB/PSI- REG/I/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Majapahit No.16, Kota Mataram	1. Salinan dokumen informasi seluruh dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk peningkatan jalan lapen dan talud se kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022 dan 2023 baik yang sumber dananya dari DAK dan DAU. 2. Salinan dokumen informasi kontrak kerja peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum paket 63.737 PPSU dusun bakan desa darmaji kecamatan kopang kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2023.	PUTUSAN Nomor : 004/KINTB/PSI- KEP.2/III/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
2.	002/KINTB/PSI- REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah Jl. Raden Puguh, Gedung A, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jelojok – Dasan Baru Kabupaten Lombok tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan/Rekonstruksi Ruas Jelojok – Dasan Baru Tahun Anggaran 2023. 3. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Pemeliharaan Ruas Jalan Pagutan – Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 4. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pemeliharaan Ruas Jalan Pagutan – Peringgarata Tahun Anggaran 2023.	PUTUSAN Nomor : 006/KINTB/PSI- KEP.2/VI/2024
3.	003/KINTB/PSI- REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah Jl. Basuki Rahmat No. 10, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung Labkseda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Gedung Labkseda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.	PUTUSAN Nomor : 008/KINTB/PSI- KEP.2/VII/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
4.	004/KINTB/PSI- REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Pendidikan No. 19A, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram	1. Dokumen Informasi Sumber dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang dan SMKN 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat. SMKN 1 Batu Kliang, dan SMKN 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 3. Dokumen Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMKN 1 Jonggat, SMKN 1 Batu Kliang dan SMKN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023	PUTUSAN Nomor : 005/KINTB/PSI- KEP.2/V/2024
5.	005/KINTB/PSI- REG/II/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah Jl. Raden Puguh, Gedung A, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Peningkatan Jalan Ruas Makam Ketak – Monggas Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Informasi Peningkatan Jalan Ruas Makam Ketak – Monggas Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 3. Salinan Dokumen Informasi DPA Peningkatan Jaringan Irigasi di Muncan Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2022. 4. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan Jaringan Irigasi di Muncan Tahun Anggaran 2022.	PUTUSAN Nomor : 007/KINTB/PSI- KEP.2/VI/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				5. Salinan Dokumen Informasi DPA Peningkatan Jalan Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. 6. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan Jalan Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggran 2023.	
6.	006/KINTB/PSI-REG/II/2024	LALU KHAERUL FATONI PENGALUNG, DESA KERAME JATI, KECAMATAN PUJUT, KAB. LOMBOK TENGAH	PT BANK NTB SYARIAH KC PRAYA JL. GAJAH MADA No. 127, PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	1. Data Penggunaan dana CSR dan RAB Tahun 2019 sampai dengan 2023.	PUTUSAN NOMOR : 001/KINTB/PSI-KEP.1/VII/2024
7.	007/KINTB/PSI-REG/VI/2024	ABDUL MANAF TELOK MANGKUNG DAYE, DESA MANGKUNG, KEC. PRAYA BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH	KPU KAB. LOMBOK TENGAH JL. SUKARNO HATTA, LENENG PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	1. Surat dan Isi dari Tanggapan Masyarakat terkait tidak lulusnya Pemohon menjadi anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	PUTUSAN NOMOR : 009/KINTB/PSI-KEP.2/VII/2024
8.	008/KINTB/PSI-REG/VII/2024	SADDAM HUSEN JL. SANGKONG, DESA BONDER, KEC. PRAYA BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH	DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH JL. GAJAH MADA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Dokumen Pembiayaan Bau Nyale 2022-2023 : - Pengretrutan Putri Nyale 2022-2023 - Pelantikan Putri Nyale 2022-2023 - Pembiayaan Malam Puncak Bau Nyale 2022-2023 - Akomodasi Putri Nyale 2022-	PUTUSAN NOMOR : 011/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				2023	
9.	009/KINTB/PSI- REG/VII/2024	DPD GMPRI JL. AHMAD YAMIN No. 02 PRAYA, KEC. PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	PT TIRTA ARDHA RINJANI LOMBOK TENGAH JL. AHMAD YANI NO. 11 PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT	1. Dokumen Informasi Jumlah Pelanggan saat ini dan peningkatan pelanggan selama 5 tahun belakang. 2. Dokumen Informasi Realisasi/Pengalokasian Anggaran selama 5 tahun belakang. 3. Dokumen Informasi Jumlah Dana Pembayaran Konsumen selama 5 tahun kebelakang. 4. Dokumen Informasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun kebelakang. 5. Dokumen Informasi Anggaran Masuk selama 5 tahun kebelakang.	PUTUSAN Nomor : 010/KINTB/PSI- KEP.2/VIII/2024
10.	010/KINTB/PSI- REG/VII/2024	DPD GMPRI JL. AHMAD YAMIN No. 02 PRAYA, KEC. PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	DISPERINDAG LOMBOK TENGAH JL GAJAH MADA KOMPLEK DINAS PERKIM KELURAHAN LENENG- KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Dokumen Informasi Sumber Dana untuk Pembangunan Central UMKM, yang berlokasi di Kecamatan Kopang, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan/Tehabilitasi Bangunan 3. Jumlah Anggaran Pembangunan Gedung Central UMKM 4. Dokumen Informasi Pengadaan	<u>P E N E T A P A N</u> Nomor : 001/KINTB/PSI- PNTTP/VIII/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				Terop Tahun 2022-2023.	
11.	011/KINTB/PSI- REG/VII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMAN 1 Praya Jl. Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Informasi mengenai jalur atau skema Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2023 dan 2024; 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut; 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini; 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMAN 1 Praya; 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/pengunaan iuran SPP yang sudah diterima pihak SMAN 1 Praya; 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut; 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023 dan 2024.	<u>P E N E T A P A N</u> Nomor : 002/KINTB/PSI- PNTTP/VIII/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
12.	012/KINTB/PSI- REG/VII/2024	DPD GMPRI JL. AHMAD YAMIN No. 02 PRAYA, KEC. PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH	DINAS PERTANIAN LOMBOK TIMUR JL. DR. CIPTO MANGUN KUSUMO NO.1, KHUSUS KOTA SELONG, KEC. SELONG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1. Dokumen informasi salinan data kelompok penerima bantuan alat-alat pertanian tahun 2022-2023. 2. Dokumen informasi jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengadaan bantuan alat-alat pertanian. 3. Dokumen salinan anggaran dana dinas pertanian kabupaten lombok tengah tahun 2022-2023. 4. Dokumen salinan realisasi dan alokasi anggaran dinas pertanian kabupaten lombok timur tahun 2022-2023.	<u>P E N E T A P A N</u> Nomor : 004/KINTB/PSI- PNTTP/X/2024
13.	013/KINTB/PSI- REG/VII/2024	DPD GMPRI BTN GRAND RIVERSIDE, BLOK D NO. 8, KELURAHAN JONTLAK, KECAMATAN PRAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	DINAS KESEHATAN LOMBOK TIMUR JL. AHMAD YANI NO.100, SANDUBAYA, KEC. SELONG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BAR. 83612	1. Dokumen informasi anggaran dinas kesehatan kabupaten lombok timur tahun 2022-2023. 2. Dokumen informasi alokasi anggaran dinas kesehatan kabupaten lombok timur tahun 2022-2023. 3. Dokumen informasi realisasi anggaran dinas kesehatan kabupaten lombok timur tahun 2022-2023.	<u>P E N E T A P A N</u> Nomor : 005/KINTB/PSI- PNTTP/X/2024
14.	014/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	SADDAM HUSEN JL. SANGKONG, DESA BONDER, KEC. PRAYA BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNIT WILAYAH NTB JL. LANGKO NO.25- 27, TAMAN SARI, KEC. AMPENAN, KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA	1. Dokumen informasi jumlah pelanggan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Praya Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan. 2. Dokumen informasi Nama, Alamat, ID Penerima atas pemberian ganti rugi atau kompensasi terhadap keberadaan tiang listrik dan gardu di lahan milik warga wilayah kabupaten lombok tengah secara	PUTUSAN Nomor : 012/KINTB/PSI- KEP.2/X/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
			BAR. 83114	keseluruhan. 3. Dokumen informasi pendapatan dana CSR dan penggunaan dana SDR PT PLN (Persero) Unit layanan pelanggan praya kabupaten lombok tengah tahun 2021-2023. 4. Dokumen informasi pendapatan pajak penerangan jalan (PPJ) PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2023.	
15.	015/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMAN 2 PRAYA Jl. Pejanggik No.3, Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83518	1. Informasi mengenai jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMAN 2 Praya. 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak SMAN 2 Praya. 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut. 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran 2023-2024	<u>P E N E T A P A N</u> Nomor : 003/KINTB/PSI- PNTTP/IX/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
16.	016/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	MAN 2 LOMBOK TENGAH Jl. Desa Jelantik, Jonggat, Jelantik, Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83561	1. Informasi jalu-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini. 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di MAN 2 Lombok Tengah. 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak MAN 2 Lombok Tengah 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut. 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024	PEMBATALAN REGISTER
17.	017/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	MAN 1 Lombok Tengah Jl. Pejanggik No.5, Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83518	1. Informasi mengenai jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini. 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan MAN 1 Lombok Tengah. 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak MAN 1 Lombok Tengah 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP	PEMBATALAN REGISTER

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				yang sudah diterima tersebut 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024	
18.	018/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMAN 1 Jonggat Jl. Raya Ubung, Ubung, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83362	1. Informasi jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini. 4. Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMA 1 Jonggat 5. Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang di terima SMAN 1 Jonggat 6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut 7. Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024 8. Mohon salinan arkas tahun 2023-2024	<u>P E N E T A P A N</u> Nomor : 006/KINTB/PSI-PNTP/XI/2024
19.	019/KINTB/PSI-REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim,	SMKN 2 Praya Jl. Pejanggik No.09, Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,	1. Informasi jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 2. Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut 3. Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif	PEMBATALAN REGISTER

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
		Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Bar. 83513	belajar sampai saat ini - Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMKN 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah - Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak SMKN 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah - Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut - Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024s	
20.	020/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	SMKN 1 Praya Jl. Pejanggik No.8, Semayan, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83518	- Informasi mengenai jalur-jalur atau skema penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 - Jumlah kouta untuk masing-masing jalur atau skema penerimaan tersebut. - Jumlah realisasi siswa yang akhirnya diterima dan saat ini aktif belajar sampai saat ini. - Informasi mengenai jumlah iuran SPP bulanan di SMKN 1 Praya Pariwisata. - Informasi mengenai pengelolaan, peruntukan/penggunaan iuran SPP yang diterima pihak SMKN 1 Praya Pariwisata. - Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terkait dana iuran SPP yang sudah diterima tersebut. - Informasi mengenai dana BOS dan penggunaannya selama tahun ajaran tahun 2023-2024	<u>P E N E T A P A N</u> Nomor : 007/KINTB/PSI- PNTTP/XI/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
21.	021/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	PDAM Tirta Ardhia Rinjani 88JQ+X6M, Darmaji, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83553	1. Jenis layanan apa saja yang ada di PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 2. Bagaimana urutan proses perjalanan air bersih PDAM hingga sampai ke rumah warga. 3. Informasi dan data mengenai angka jumlah keseluruhan pelanggan PDAM Tirta Ardhia Rinjani sampai saat ini. 4. Informasi dan data mengenai jumlah pelanggan PDAM Tirta Ardhia Rinjani per kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah 5. Informasi mengenai spot/titik sumber air yang disalurkan oleh PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 6. Informasi dan data berapa jumlah kantor pelayanan yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah. 7. Informasi dan data mengenai jumlah seluruh karyawan baik tetap maupun kontrak di PDAM Tirta Rinjani. 8. Informasi dan data mengenai pola rekrutmen karyawan/tenaga kerja di PDAM Tirta Ardhia Rinjani, apakah bersifat terbuka atau tertutup. 9. Bila rekrutmennya bersifat terbuka, media apa saja yang dipakai sebagai sarana pengumuman open rekrutmen, tolong disebutkan nama medianya. 10. Perhitungan pemakaian PDAM dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. 11. Berapa tahun sekali meteran PDAM diganti. 12. Berapa biaya menjadi pelanggan	PUTUSAN Nomor : 016/KINTB/PSI- KEP.2/XII/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				baru PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 13. Atas biaya pemasangan baru tersebut, tolong diuraikan untuk apa saja. 14. Berapa alokasi CSR di PDAM Tirta Ardhia Rinjani. 15. Kemana saja pendistribusian CSR PDAM Tirta ardhia Rinjani. 16. Kapan terakhir penyerahan atau kegiatan CSR PDAM Tirta Ardhia Rinjani 17. Untuk pembayaran setiap bulan yang dibayarkan oleh pelanggan dan atau untuk nilai yang ditagihkan kepada pelanggan oleh PDAM Tirta Ardhia Rinjani, apakah Cuma beban bayar pemakaian saja atau ada parameter lain yang dikenakan biaya atau bebam. 18. Berapa keuntungan PDAM Tirta Ardhia Rinjani tahun 2022 dan 2023. 19. Berapa biaya pengeluaran rutin setiap bulan PDAM Tirta Ardhia Rinjani 20. Data struktur pengurus atau struktur kepegawaian di PDAM Tirta Ardhia Rinjani.	
22.	022/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah JL. GAJAH MADA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi DPA, Salinan dokumen informasi Kontrak Kerja dan Salinan Dokumen Informasi Perpanjangan Kontrak Kerja Pembangunan Sintung Park Tahun Anggaran 2022 dan 2023. 2. Salinan Dokumen Informasi DPA dan Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Obyek Wisata Aik Bukak Tahun Anggaran 2023	PUTUSAN Nomor : 015/KINTB/PSI- KEP.2/XI/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
23.	023/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	PUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jln. Basuki Rahmat, Kantor Bupati Gedung A, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi DPA Rehabilitasi Saluran Sekunder di Embung Berenge Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah TA 2024 dan dokumen Kontrak Kerjanya. 2. Salinan dokumen informasi DPA Rehabilitasi saluran sekunder se Kabupaten Lombok Tengah di 12 Kecamatan TA 2023 dan 2024	
24.	024/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	MTS 1 LOMBOK TENGAH		PEMBATALAN REGISTER
25.	025/KINTB/PSI- REG/VIII/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Pubulik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	MTS 2 LOMBOK TENGAH		PEMBATALAN REGISTER

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
26	026/KINTB/PSI- REG/IX/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi nama-nama sekolah SD, SMP, dan PAUD yang menerima dana DAK untuk Rehabilitasi Gedung belajar dan Gedung Perpustakaan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 dan 2024. 2. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Rehabilitasi Gedung SD, SMP, PAUD dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 beserta seluruh Salinan dokumen kontrak kerjanya se Kabupaten Lombok Tengah.	PUTUSAN Nomor : 014/KINTB/PSI- KEP.2/XI/2024
27	027/KINTB/PSI- REG/X/2024	LALU KHAERUL FATONI PENGALUNG, DESA KERAME JATI, KECAMATAN PUJUT, KAB. LOMBOK TENGAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah Jl Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83511	1. Dokumen informasi Sumber Dana Untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Praya Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. 2. Dokumen DPA untuk Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Praya Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. 3. Dokumen Kontrak Kerja Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Praya Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.	PEMBATALAN REGISTER
28	028/KINTB/PSI- REG/X/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Publik NTB (FP4-NTB) Jl. H. Lalu Hasim,	RSUD Praya Jl. H Lalu Hasim, Tiwugalih, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Skema atau pola rekrutmen Penerimaan karyawan baru yang dimaksud 2. Bila sara yang dipakai terbuka, mohon di sebutkan melalui media apa pengumuman rekrutmen kebutuhan akan karyawan di sampaikan atau di umumkan 3. Berapa total keseluruhan jumlah	PUTUSAN NOMOR : 002/KINTB/PSI- KEP.1/XI/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
		Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah		karyawan RSUD Praya saat ini? Baik PNS/ASN atau Non PSN/ASN sebelum adanya pengangkatan atau penerimaan karyawan baru yang kami maksud. 4. Apa dasar atau urgensi pengangkatan karyawan RSUD Praya saat ini 5. Berapa orang karyawan RSUD terbaru yang diangkat 6. Pengangkatan terhadap karyawan/pegawai baru tersebut menggunakan SK apa? Apakah SK Bupati Kab. Lombok Tengah atau SK Direktur RSUD Praya 7. Apa status yang melekat pada karyawan yang baru diangkat tersebut? Sukarela? Honor? Kontrak?P3K? atau ASN 8. Darimana sumber penggajian terhadap karyawan baru tersebut bila tidak termasuk karyawan atau pegawai sukarela 9. Meminta salinan SK Direktur untuk pengangkatan karyawan baru.	
29	029/KINTB/PSI- REG/X/2024	Forum Peduli Pembangunan dan Layanan Publik NTB (FP4-NTB) di Jl. H. Lalu Hasim, Buse, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	PUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jln. Basuki Rahmat, Kantor Bupati Gedung A, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Berapa jumlah sumur bor yang ada di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun anggaran 2023-2024 2. Data dan informasi terkait titik atau tempat sumur bor diatas 3. Darimana sumber dana pembuatan sumur bor tersebut diatas, tolong diberikan informasi terkait pendanaan sumur bor tersebut.	PUTUSAN Nomor : 017/KINTB/PSI- KEP.2/XII/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
30.	030/KINTB/PSI- REG/X/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	PUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH Jln. Basuki Rahmat, Kantor Bupati Gedung A, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Dokumen Informasi DPA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Perigi – Kampung Desa Ketare Kecamatan Pujut Tahun Anggaran 2024. 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Perigi – Desa Ketare Kecamatan Pujut Tahun Anggaran 2024.	MASIH DALAM PROSES SENGKETA
31	031/KINTB/PSI- REG/X/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS PERKIM LOMBOK TENGAH Jl. Gajah Mada No.103, Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah	1. Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan Jalan penataan Lingkungan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024. 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan Jalan Penataan Lingkungan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.	PUTUSAN Nomor : 003/KINTB/PSI- KEP.2/I/2025
32	032/KINTB/PSI- REG/X/2024	Hamzanwadi Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah	PERKIM PROVINSI NTB Jl. Majapahit No.16, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram,	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk program : Peningkata Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman di 12 Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024, dari APBD Murni maupun APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	PUTUSAN Nomor : 002/KINTB/PSI- KEP.2/I/2025

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				2. Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja untuk Program : Peningkatan Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kegiatan : Urusan Pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UMUM Permukiman di 12 Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024, dari APBD Murni maupun APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.	
33	033/KINTB/PSI-REG/X/2024	ANDRIAWAN Pengenem Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kab. Lombok Tengah	Pengenem Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kab. Lombok Tengah Setiling, Kec. Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah	1. Salinan Dokumen Informasi APBDes dan APBDes Murni Tahun Anggaran 2020-2023.	PUTUSAN NOMOR : 003/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2024
34.	034/KINTB/PSI-REG/XI/2024	DPD GMPRI Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS PUPR PROVINSI NTB Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115	1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi NTB, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi NTB, Tahun 2022-2023.	PUTUSAN NOMOR : 004/KINTB/PSI-KEP.1/XII/2024

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
35.	035/KINTB/PSI- REG/XI/2024	DPD GMPRI Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126	1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023.	PUTUSAN NOMOR : 001/KINTB/PSI- KEP.1/I/2025
36.	036/KINTB/PSI- REG/XI/2024	DPD GMPRI Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB Jl. Semanggi Jl. Pejanggik No.8, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122	1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023. 2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2022-2023.	PEMBATALAN REGISTER
37.	037/KINTB/PSI- REG/XII/2024	SRI SUZANA Lingkungan Karijawa Selatan RT 013/RW 06, Kab. Dompu	INSPEKTORAT PROVINSI NTB Jl. Langko Pejeruk No.27, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara pada Pengadaan Alat Kemetrologian lengkap dan prasarana lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018	MASIH DALAM PROSES SENGKETA

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
38.	038/KINTB/PSI- REG/XII/2024	SRI SUZANA Lingkungan Karijawa Selatan RT 013/rw 06, Kab. Dompu	INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU Jl. Syech Moh., Bali, Kec. Dompu, Kabupaten Dompu	1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas audit insvestigasi pada Proyek Pengadaan Alat kemetrolagian dan Sarana Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018	PUTUSAN Nomor : 001/KINTB/PSI- KEP.2/I/2025

Sumber Data : *Komisi Informasi Provinsi NTB tahun 2024 .*

Bagian V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID OPD hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Provinsi NTB;

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masih beradaptasi dari adanya hak-hak memperoleh informasi bagi pemohon informasi belum maksimal di tindak lanjuti oleh PPID OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masih lemahnya optimalisasi daya dukung infrastruktur dan suprastruktur di masing-masing website PPID pembantu di masing-masing OPD, masih minimnya pengetahuan sumberdaya pemahaman terhadap UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masih banyak ditemukan di masing-masing PPID pembantu atas kewajiban memberikan Informasi melalui website PPID pembantu untuk menyediakan layanan Informasi serta merta, informasi berkala, informasi klarsifikasi data dikecualikan dan informasi yang wajib di sediakan, masih banyaknya badan publik yang belum menetapkan / menunjuk pejabat fungsional dan atau petugas informasi yang membantu PPID dalam pelaksanaan tugas tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidak siapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

Bagian VI

SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi NTB, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah untuk tetap mengelola DIP tersebut dan menginputnya pada sistem / website yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi NTB agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

6.2 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi NTB sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mataram, Desember 2024

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik



Drs. Harun Alrasyid
NIP. 19670925 199303 1 007

Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM
NIP. 19750112 199603 1006

Tabel 7.1. Daftar Permohonan Informasi

Tanggal	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan	Waktu Pemenuhan (hari)	Status
04 Januari, 2024	saya ingin mendapatkan surat rekomendasi pemasukan dari kota NTB terutama kota Lombok	pengiriman barnag domestik	7	Dipenuhi
04 Januari, 2024	SAYA BERNAMA BADARUDIN INGIN MENERIMA SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN DARI KOTA LOMBOK semoga dalam perihal ini bisa di bantu untuk di setujui terima kasih kepada seluruh staff/pejabat menerima laporan saya	KEBUTUHAN UNTUK PERDAGANGG AN LOKAL KULIT SAPI KERING	7	Dipenuhi
13 Februari, 2024	Sejarah Singkat Bakesbangpoldagri NTB	Pembuatan Laporan Magang	0	Ditolak (Alasan sudah kami jawab di permintaan tanggal 15/2/2024)
15 Februari, 2024	Sejarah Singkat Bakesbangpoldagri NTB	Pembuatan Laporan Magang	7	Dipenuhi(klarifikasi Jawaban di tolak Tgl 13 Feb 2024 dengan pertanyaan sama.
02 April, 2024	. Bagaimana prosedur pengiriman bakalan sapi simental dan/atau limosin dari Jawa ke Lombok? Apa saja Perizinan yang diperlukan?	pembelian sapi dari pulau sumbawa yang baik, benar dan beradab	0	Dipenuhi
04 Oktober 2023	Sava membutuhkan data Nama Ketua umum. Harian. dan Alamat Kantor Dekranasda Kab / Kota di Prov. NTB	Untuk Mendata Tamu Undangan HUT. Dekranas Ke 44 di Surakarta Tahun 2024	0	Dipenuhi
12 Nov 2023	Sejarah Kesbangpol	Sebagai bahan laporan peraktik kerja lapangan	0	Dipenuhi

Sumber data : <https://ppid.ntbprov.go.id/laporan-pelayanan-informasi.html>

Tabel 7.2. Daftar Informasi Dikecualikan

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin Sembilan September tahun 2024, bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, telah dilakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

I. RSUD Provinsi NTB:

TABEL KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

RSUD Provinsi NTB dibawah ini :

NO	INFORMASI (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen Rekam Medis	a) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Prektrek kedokteran b) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c) UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit d) Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis e) Permenkes No. 36 tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran f) Permenkes No. 69 tahun 2014 tentang kewajiban RS dan pasien	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang : diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Tuntutan pasien / keluarga kepada RS 3. Mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Menjaga rahasia pribadi pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
2.	Identitas petugas yang melakukan kesalahan dan yang melaporkan	UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	1. Mengungkapkan rahasia pribadi 2. Mengganggu kepentingan	Menjaga rahasia pribadi pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

- 5 -

	dalam laporan insiden keselamatan pasien		institusi rumah sakit		
3.	Kode akses elektronik rekam medis	a) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Prektrek kedokteran b) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c) UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit d) Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis e) Permenkes No. 36 tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran f) Permenkes No. 69 tahun 2014 tentang kewajiban RS dan pasien	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang : diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Tuntutan pasien / keluarga kepada RS 3. Mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Menjaga rahasia pribadi pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
4.	Sistem keamanan elektronik rekam medis	a) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Prektrek kedokteran b) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c) UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit d) Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis e) Permenkes No. 36 tahun 2012 Tentang	1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang : diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Tuntutan pasien / keluarga kepada RS 3. Mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Menjaga rahasia pribadi pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

Sumber data lengkapnya ada di website : <https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-30-informasi-yang-dikecualikan.html>

Tabel 7.3. Besaran Anggaran PPID Utama NTB

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp73.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp73.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp73.800.000
	[#] Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)					Rp73.800.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp18.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000	0	Rp7.800.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Koordinator	3 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp21.600.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dgn Keputusan Sekda Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp18.000.000

